

**AKIBAT HUKUM KESALAHAN PROSEDUR PEMILIHAN  
PENYEDIA JASA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK  
KERJA KONSTRUKSI**

**(Studi pada Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2  
Provinsi Bengkulu APBN Tahun Anggaran 2020)**

**TESIS**

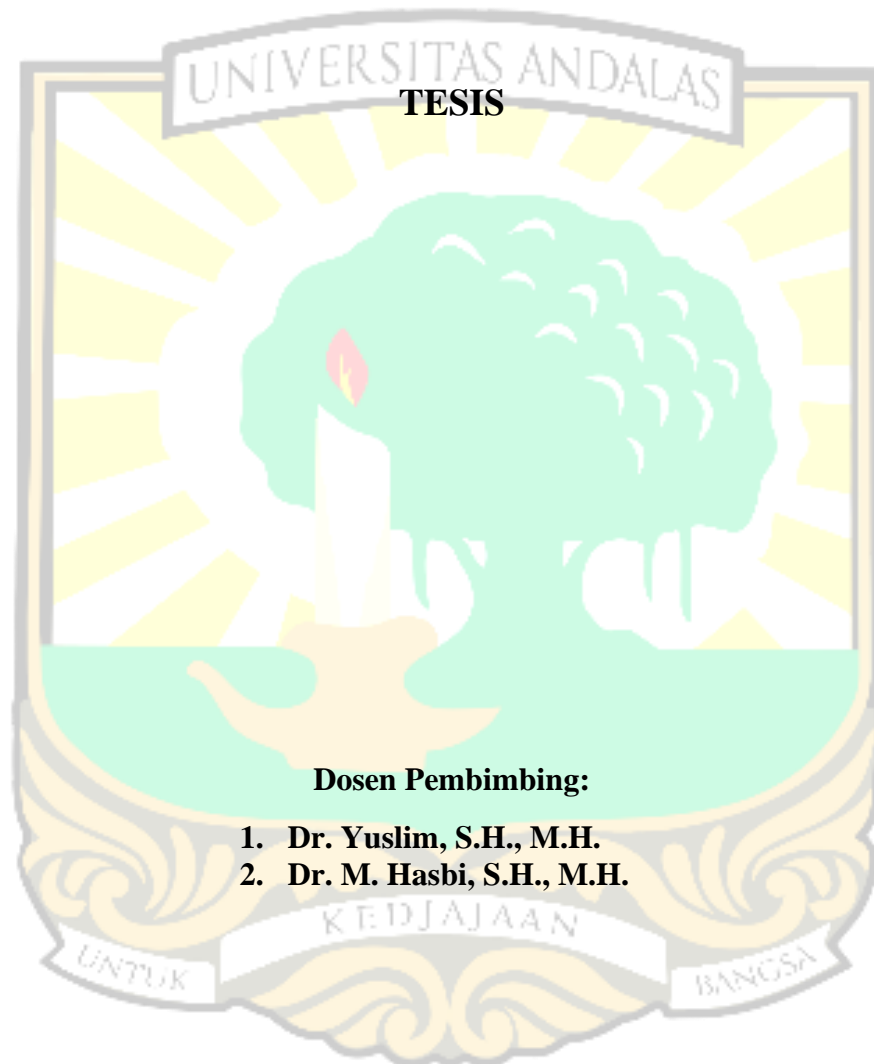


**Disusun Oleh:**

**APRILIA GAYATRI, S.H.  
NIM. 2120119004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2023**

**AKIBAT HUKUM KESALAHAN PROSEDUR PEMILIHAN  
PENYEDIA JASA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK  
KERJA KONSTRUKSI  
(Studi pada Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2  
Provinsi Bengkulu APBN Tahun Anggaran 2020)**



**Dosen Pembimbing:**

- 1. Dr. Yuslim, S.H., M.H.**
- 2. Dr. M. Hasbi, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2023**

**AKIBAT HUKUM KESALAHAN PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA  
JASA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP  
PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI  
(Studi pada Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 Provinsi Bengkulu  
APBN Tahun Anggaran 2020)**

(Aprilia Gayatri, NIM. 2120119004, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas  
Hukum Universitas Andalas)

**ABSTRAK**

Tindakan Pemerintahan yang memiliki segi hukum publik dan hukum privat tergambar dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJP). Kegiatan ini yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai APBN/APBD, yang rangkaian prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Tesis ini berfokus pada pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa, dengan mengambil studi pada pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK terhadap kontrak Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 di Provinsi Bengkulu APBN Tahun Anggaran 2020. Pemutusan kontrak yang telah berjalan merupakan akibat hukum dari adanya pengaduan telah terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan penyedia jasa, dan dinyatakan benar oleh APIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan dan teori kepastian hukum. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data lapangan, hasil wawancara dan dokumen kontrak. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tindakan hukum pemerintah dalam ranah hukum publik pada tahap PBJP dari perencanaan, persiapan sampai dengan pemilihan, yang diwakili oleh PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan tidak boleh mengandung unsur kekurangan yuridis atau cacat formil (kekhilafan, penipuan atau paksaan), karena tindakannya akan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Adanya kekurangan yuridis atau cacat formil pada tindakan hukum pemerintah dalam kegiatan PBJP di ranah hukum publik, menimbulkan akibat hukum terhadap tindakan hukum pemerintah di ranah hukum privat yaitu saat pelaksanaan kontrak. Terbitnya kontrak Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 didahului dengan penetapan hasil pemilihan yang dikeluarkan Pokja Pemilihan sebagai pejabat tata usaha negara, sehingga adanya kesalahan prosedur pemilihan dapat menimbulkan akibat hukum dalam pelaksanaan kontrak dengan diputusnya kontrak secara sepihak oleh PPK. Kontrak dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa merupakan kontrak baku yang formatnya telah disiapkan oleh PPK, sehingga terdapat keterbatasan dari penyedia jasa untuk turut serta menentukan isi kontrak. Pemutusan kontrak karena adanya kesalahan prosedur pemilihan yang baru terbukti saat kontrak sudah berjalan, sesungguhnya dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tidak sejalan dengan prinsip efisien dan efektif dalam penyelenggaraan PBJP.

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kontrak Kerja Konstruksi.

**LEGAL CONSEQUENCES OF PROCUREMENT SERVICE PROVIDER  
PROCEDURAL ERRORS IN GOVERNMENT PROCUREMENT OF  
GOODS/SERVICES TOWARDS THE IMPLEMENTATION OF  
CONSTRUCTION CONTRACT**

**(A Study on the Construction of the Pulau Baai 2 Bridge Duplication in  
Bengkulu Province, APBN 2020)**

(Aprilia Gayatri, NIM. 2120119004, Master of Law, Faculty of Law, Andalas  
University)

**ABSTRACT**

Government actions that have both public and private legal aspects are manifested in the implementation of Government Procurement of Goods/Services (PBJP). This activity is carried out by Ministries/Agencies/Regional Authorities financed by the State Budget (APBN) or Regional Budget (APBD), with a series of processes starting from needs identification to project handover. This thesis focuses on government procurement of goods/services for construction works by service providers, with a case study on contract termination carried out by the Contracting Officer (PPK) regarding the Duplication of Baai Island Bridge 2 in Bengkulu Province, funded by the APBN for the Fiscal Year 2020. The contract termination that has taken place is a legal consequence of a reported procedural error committed by the Procurement Committee (Pokja Pemilihan) during the service provider selection process, which has been confirmed as valid by the Ministry of Public Works and Housing's Inspectorate General (APIP). The research method utilized is an empirical juridical approach with a descriptive-analytical nature. The theories employed in this study are the theory of authority and the theory of legal certainty. The primary data sources for this research are field data, interview results, and contract documents. Based on the research findings, it is concluded that the government's legal actions in the public law realm during the PBJP process, from planning and preparation to selection, represented by the Procurement Committee (PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan), must not contain elements of legal deficiencies or formal defects (mistakes, fraud, or coercion), as such actions would have legal consequences for individuals or legal entities. The presence of legal deficiencies or formal defects in the government's legal actions within the public law domain during the PBJP activities results in legal consequences for the government's legal actions within the private law realm, specifically during contract execution. The issuance of the contract for the Duplication of Baai Island Bridge 2 is preceded by the appointment of the selected bidder as issued by the Procurement Committee acting as a state administrative official, therefore, any procedural errors in the selection process may result in legal consequences during the contract execution, leading to unilateral contract termination by the Contracting Officer (PPK). The contract in the implementation of PBJP is a standard contract with a predetermined format prepared by the PPK, thus limiting the service provider's involvement in determining the contract terms. Contract termination due to proven procedural errors that arise after the contract is already in effect may result in losses for both parties and is not in line with the principles of efficiency and effectiveness in the implementation of PBJP.

Keywords: Government Procurement of Goods/Services, Construction Contract.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR SINGKATAN .....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Keaslian Penelitian.....	15
F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	17
1. Kerangka Teoritis .....	17
2. Kerangka Konseptual .....	25
G. Metode Penelitian .....	30
1. Metode Pendekatan .....	30
2. Sifat Penelitian .....	30
3. Jenis dan Sumber Data .....	31
4. Teknik Pengumpulan Data .....	35
5. Analisis Data .....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Tindakan Pemerintah .....	37
1. Pengertian Tindakan Pemerintahan dan Fungsi Pemerintahan .....	37

2.	Bentuk-Bentuk Tindakan Pemerintah .....	39
3.	Syarat Keabsahan Tindakan Pemerintahan .....	47
B.	Konsep Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....	51
1.	Pengertian dan Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....	51
2.	Prinsip-Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....	56
3.	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....	63
4.	Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia .....	70
5.	Pengawasan, Pengaduan dan Sanksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....	79
C.	Konsep Kontrak Kerja Konstruksi .....	85
1.	Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi .....	85
2.	Syarat Sahnya Kontrak Kerja Konstruksi .....	87
3.	Bentuk-Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi .....	91
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>94</b>
A.	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Paket Pekerjaan Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 Provinsi Bengkulu APBN Tahun Anggaran 2020 .....	94
B.	Akibat Hukum Kesalahan Prosedur pada Tahap Pemilihan Penyedia Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 Provinsi Bengkulu .....	135
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>168</b>
A.	Kesimpulan .....	168
B.	Saran .....	171
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>174</b>